



NOMOR BUKTI PEMOTONGAN	PERIODE PENGHASILAN	SIFAT PEMOTONGAN	STATUS BUKTI PEMOTONGAN
2509SGO0C	09-2025-12-2025	TIDAK FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1	NIK/NPWP	:	3510141005850010	A.7	Status PTKP	:	K3
A.2	Nama	:	SAIBUDIN JUHRI	A.8	Posisi	:	PPPK
A.3	Alamat	:	JLN.PULAU NATUNA	A.9	Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja	:	Tidak
A.4	NIP/NRP	:	198503102025211049				
A.5	Jenis Kelamin	:	Pria				
A.6	Pangkat/Golongan	:	V / V				

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

B.1.1	Kode Objek Pajak	:	21-100-01	B.1.2	Objek Pajak	:	Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap
B.2	Jenis Pemotongan	:	Kurang dari Setahun				

NO B.3	URAIAN B.4	JUMLAH (Rp) B.5
I PENGHASILAN BRUTO		
1.	Gaji Pokok/Pensiun	10.046.000
2.	Tunjangan Istri	1.004.600
3.	Tunjangan Anak	401.840
4.	Tunjangan Perbaikan Penghasilan	0
5.	Tunjangan Struktural / Fungsional	0
6.	Tunjangan Beras	1.158.720
7.	Tunjangan Lain-lain	720.164
8.	Penghasilan Tetap dan Teratur Lainnya yang Pembayaran Terpisah dari Pembayaran Gaji	1.835.000
9.	Jumlah Penghasilan Bruto (1 s.d. 8)	15.166.324
II PENGURANG PENGHASILAN BRUTO		
10.	Biaya Jabatan / Biaya Pensiun	758.316
11.	Iuran terkait Pensiun atau Hari Tua	0
12.	Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib yang Dibayarkan melalui Pemberi Kerja	0
13.	Jumlah Pengurangan (10 s.d. 12)	758.316
III PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
14.	Jumlah Penghasilan Neto (9 - 13)	14.408.008
15.	Penghasilan Neto dari Pemotongan Sebelumnya	0
16.	Jumlah Penghasilan Neto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Setahun / Disetahunkan)	14.408.008
17.	Penghasilan Tidak Kena Pajak	72.000.000
18.	Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan (16 - 17)	0
19.	PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan	0
20.	PPh Pasal 21 Terutang	0
21.	PPh Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya	0
22.	PPh Pasal 21 Terutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)	0
23.	PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong	0
24.	PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (22 - 23)	0

C. IDENTITAS PEMOTONG PPh

C.1	NPWP	:	0001135839908000
C.2	NITKU atau Nomor Identitas Subunit Organisasi	:	0001135839908000000000 - PENGADILAN AGAMA NEGARA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG
C.3	Nama Pemotong	:	PENGADILAN AGAMA NEGARA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG
C.4	Tanggal	:	12 Februari 2026
C.5	Nama Penandatangan	:	IZZATIL MILLAH
C.6	Pernyataan	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan ini telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah.



Ditandatangani secara elektronik



TAHUN PAJAK/ BAGIAN TAHUN PAJAK/	PERIODE			STATUS	SUMBER PENGHASILAN	METODE PEMBUKUAN
2025	1 BULAN MULAI	s.d	12 BULAN AKHIR	NORMAL	Pekerjaan	Pencatatan

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. NIK/NPWP	3510141005850010	7. Status Kewajiban Perpajakan Suami dan Istri	
2. Nama	SAIBUDIN JUHRI	(Jika status kewajiban perpajakan Anda dengan pasangan adalah PH/MT, Anda diwajibkan mengisi bagian ini dan Lampiran 4 Bagian B)	
3. Jenis ID	KTP	8. NIK/NPWP Suami/Istri	
4. No. ID	3510141005850010		
5. No. Telepon	085137568812		
6. Email	saibudinjuhri85@gmail.com		

B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1 a	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian D)	2	14.408.008
b	1) Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan 1c) 2. Ya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2) Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya, saya termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final. (Isi Lampiran 3B Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya) 3. Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT. (Isi Lampiran 3B Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya) 3) Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? 1. Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Tidak, saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final. (Lanjut ke pertanyaan 1c) 3. Ya, saya berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. (Isi Lampiran 3B Bagian C, Lampiran 3A-4 Bagian A, lalu ke pertanyaan 1c) 4) Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan? 1. Dagang. (Isi Lampiran 3A-1, lalu ke pertanyaan selanjutnya) 2. Jasa. (Isi Lampiran 3A-2, lalu ke pertanyaan selanjutnya) 3. Industri. (Isi Lampiran 3A-3, lalu ke pertanyaan selanjutnya) 5) Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas	1	
c	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya. (Isi Lampiran 3A-4 Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	1	0
d	Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya. (Isi Lampiran 2 Bagian C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	1	0

C. PERHITUNGAN PPh TERUTANG

2	Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d)		14.408.008
3	Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya. (Isi Lampiran 5 Bagian A dan/atau Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	1	0
4	Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (2-3)		14.408.008
5	Penghasilan tidak kena pajak K/3 = 72.000.000		72.000.000
6	Penghasilan kena pajak (4-5)		0
7	PPh terutang		0
8	Apakah terdapat pengurang PPh terutang? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya. (Isi Lampiran 5 Bagian C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	1	0
9	PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (7-8)		0

D. KREDIT PAJAK

10 a	Apakah terdapat PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian E, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	2	0
b	Angsuran PPh Pasal 25		0
c	STP PPh Pasal 25 (Hanya pokok pajak)		0
d	Apakah Anda menerima pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya. (Isi dengan jumlah pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	1	0



NIK/NPWP

3510141005850010

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

2025

E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

11

a

PPh kurang/lebih bayar (9-10a-10b-10c-10d)

0

b

Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?

1

1. Tidak, saya tidak memilikinya, lalu ke pertanyaan selanjutnya

0

2. Ya, saya memilikinya, (lalu dengan jumlah yang telah disetujui untuk diangsur/ditunda, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

c

PPh yang masih harus dibayar (11a-11b)

0

F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)

Ganti SPT Sebelumnya



12

a

PPh kurang/lebih bayar pada SPT yang dibetulan

-

b

PPh kurang/lebih bayar karena pembetulan (11a-12a)

-

G. PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH LEBIH BAYAR)

PPh lebih bayar pada 11a atau 12b mohon:

Nomor rekening

Nama bank

1. Dikembalikan melalui pemadanan,

Nama pemilik

2. Dikembalikan melalui permohonan pengembalian pendahuluan,

rekening

H. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

13

a

Apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya?

2

0

1. Tidak, (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Ya, angsuran PPh Pasal 25-nya adalah 1/12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak x (9-10a)

b

Apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya?

1

0

1. Tidak, (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Ya, (lalu Lampiran 4 Bagian A)

c

Apakah Anda membayar angsuran PPh Pasal 25 OPPT Tahun Pajak berikutnya?

1

1. Tidak, saya tidak memiliki kewajiban untuk membayar angsuran PPh Pasal 25.

2. Ya, angsuran PPh Pasal 25 saya adalah 0,75% dari penghasilan bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha.

I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA

14

a

Harta pada akhir Tahun Pajak (lalu Lampiran 1 Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

123.000.000

b

Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak?

1

0

1. Tidak, (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Ya, (lalu Lampiran 1 Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

c

Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final?

1

0

1. Tidak, (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Ya, (lalu Lampiran 2 Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

d

Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?

1

0

1. Tidak, (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Ya, (lalu Lampiran 2 Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

e

Apakah Anda melaporkan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal?

1

1. Tidak, (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Ya, (lalu Lampiran 3C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

f

Apakah Anda melaporkan biaya entertainment, biaya promosi, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, serta piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih?

1

1. Tidak, (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Ya, (lalu Lampiran 3D, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

g

Apakah Anda menerima dividen dan/atau penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak?

1

1. Tidak, (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

2. Ya, (Pastikan Anda sudah menyampaikan laporan realisasi investasi secara terpisah)

h

Kelebihan PPh Final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat dimintakan pengembalian.

0

(Silakan mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang secara terpisah)

J. LAMPIRAN TAMBAHAN

15

a

Laporan keuangan/laporan keuangan yang telah diaudit

1

1. Tidak 2. Ya

b

Bukti pembayaran zakat/sumbangan keagamaan

1

1. Tidak 2. Ya

c

Bukti pemotongan/pemungutan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri

1

1. Tidak 2. Ya

d

Surat kuasa khusus

1

1. Tidak 2. Ya

e

Dokumen lainnya

1

1. Tidak 2. Ya

K. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.

Penandatanganan

1

1. Wajib Pajak 2. Kuasa

Tanggal

20 Februari 2026

NIK/NPWP

3510141005850010

Tanda Tangan

Nama

SAIBUDIN JUHRI





Saibudin Juhri <saibudinjuhri85@gmail.com>

Bukti Penerimaan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

1 message

Direktorat Jenderal Pajak <no-reply@pajak.go.id>
To: saibudinjuhri85@gmail.com

Thu, Feb 26, 2026 at 9:00 AM



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan, (021) 1500200 ✉ informasi@pajak.go.id ✉
pengaduan@pajak.go.id**BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)**

Nomor BPE : **BPE-28750/CT/KPP.1708/2026**
Tanggal : 20 Februari 2026

NPWP : 3510141005850010
Nama Wajib Pajak : SAIBUDIN JUHRI
Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Tahun Pajak : 2025
Masa Pajak : Januari - Desember 2025
Status SPT : Normal
Saluran : Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT : 20 Februari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

Terima kasih telah menggunakan layanan digital DJP. SPT Anda telah tercatat dan diterima dengan baik.

Mohon simpan email ini sebagai arsip pribadi Anda.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebaran, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.